



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1392);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023–2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Gizi Spesifik yang selanjutnya disebut Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
11. Intervensi Gizi Sensitif yang selanjutnya disebut Intervensi Sensitif adalah kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya Stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
12. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan Desa.
13. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
14. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

18. Keluarga Berisiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

#### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pemangku kepentingan melaksanakan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

#### Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta menurunkan angka prevalensi Stunting melalui:

- a. peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- b. pemenuhan asupan gizi;
- c. perbaikan pola asuh;
- d. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. peningkatan akses air minum dan sanitasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penghargaan.

## BAB II

## PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan dan pemangku kepentingan menyusun rencana kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (3) Perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai target pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2024 dilaksanakan sesuai 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang mencakup:
  - a. penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting;
  - b. pendampingan Keluarga Berisiko Stunting;
  - c. pendampingan semua calon pengantin pasangan usia subur;
  - d. pengamatan Keluarga Berisiko Stunting;
  - e. audit kasus Stunting; dan
  - f. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada Keluarga Berisiko Stunting.

### BAB IV KOORDINASI Bagian Kesatu

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan TPPS tingkat Kabupaten.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal;
  - b. Perangkat Daerah;

- c. lembaga/organisasi kemasyarakatan dan profesi;
  - d. perguruan tinggi; dan
  - e. dunia usaha.
- (3) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting;
  - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
  - f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Program TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan TPPS tingkat Kecamatan.
- (2) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyediaan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
  - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
  - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Desa dan alokasi dana Desa untuk Percepatan Penurunan Stunting;

- d. monitoring dan Evaluasi Stunting di tingkat Kecamatan;
  - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
  - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
  - g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - h. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Program TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan TPPS tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. memfasilitasi tim pendamping Keluarga Berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. melakukan pendataan, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Program TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan oleh TPPS secara berjenjang.
- (2) Pemantauan oleh TPPS tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Oktober.
- (3) Pemantauan oleh TPPS tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat Bulan Oktober.
- (4) Pemantauan oleh TPPS tingkat Kabupaten dilaksanakan pada minggu kedua Bulan November.
- (5) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh TPPS secara berjenjang.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan Stunting di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 22



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 22 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN  
 PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG  
 TAHUN 2023-2024

**PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa</b>								
<b>1</b>	<b>Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i></b>								
a	Membentuk TPPS Tingkat Kabupaten	Terbentuknya TPPS Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	BAPPEDA	1	kali	1	1	1
b	Membentuk TPPS Tingkat Kecamatan	Terbentuknya TPPS Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan	1	kali	1	1	1
c	Membentuk TPPS Tingkat Desa/Kelurahan	Terbentuknya TPPS Tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa	1	kali	1	1	1
<b>2</b>	<b>Melaksanakan rapat koordinasi</b>								
a	Rapat koordinasi TPPS Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	BAPPEDA	100	persen	100	100	100
b	Rapat koordinasi TPPS Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Rapat koordinasi TPPS Tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan	Pemerintah Desa dan Kelurahan	DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
<b>3</b>	<b>Melaksanakan Rembug <i>Stunting</i></b>								
a	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES	1	kali	1	1	1
b	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	PUSKESMAS	2	kali	1	1	1
c	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan	Pemerintah Desa	PKB, PUSKESMAS, DPPPAPPKB, DINKES, DINPERMADES	2	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
<b>4</b>	<b>Mengalokasikan anggaran penurunan Stunting</b>								
a	Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mengalokasikan anggaran	Semua OPD terkait	BAPPEDA, BPKPAD, Bagian Pembangunan Setda	100	persen	100	100	100
b	Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran	Jumlah Desa yang mengalokasikan anggaran	Pemerintah Desa	BAPPEDA, DINPERMADES	100	persen	100	100	100
c	Pemangku Kepentingan mengalokasikan anggaran	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengalokasikan anggaran	Pemangku Kepentingan terkait	BAPPEDA, BPKPAD	100	persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>Memastikan ketersediaan bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan</b>								
a	Semua desa/kelurahan terdapat bidan desa yang bertempat tinggal di wilayah tersebut	Tersedianya bidan desa di semua kelurahan/desa	DINKES	Pemerintah Desa	100	persen	100	100	100
<b>6</b>	<b>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan stunting</b>								
a	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting	KEMENAG	Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Bagian Kesra	100	persen	100	100	100
b	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat kecamatan	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat kecamatan	KEMENAG	Kecamatan, Bagian Kesra	100	persen	100	100	100
c	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat desa	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat desa	KEMENAG	Pemerintah Desa, Bagian Kesra, Kecamatan	100	persen	100	100	100
<b>7</b>	<b>Meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.</b>								
a	Adanya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan stunting pada instansi atau dinas terkait	Tersedianya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan stunting pada instansi atau dinas terkait	BAPPEDA	DINPERMADES, BPKPAD	100	persen	100	100	100
b	Penyediaan anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan stunting	Tersedianya anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan stunting	BAPPEDA	Kecamatan, BPKPAD	100	persen	100	100	100
c	Penyediaan anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan stunting	Tersedianya anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan stunting	DINPERMADES	BAPPEDA, Pendamping Desa, Kecamatan	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
<b>8</b>	<b>Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting.</b>								
a	Pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	DINKES	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan	DPPPAPPKB	DINKES, Kecamatan	2	kali	2	2	2
c	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	DPPPAPPKB	DINKES, DINPERMADES, Bagian Pemerintahan	3	kali	3	3	3
<b>9</b>	<b>Menyelenggarakan pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)</b>								
a	Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	DINSOS	BAPPEDA, DINKES	100	persen	100	100	100
b	Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan	Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINKES	100	persen	100	100	100
<b>10</b>	<b>Menyelenggarakan pembinaan kader pembangunan manusia</b>								
a	Pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten	DINPERMADES	DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan	DINPERMADES	DINKES, Kecamatan, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
c	Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat desa	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat desa	DINPERMADES	DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
<b>B</b>	<b>Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku Dan Pemberdayaan Masyarakat</b>								
<b>1</b>	<b>Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.</b>								
a	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB, DINKOMINFO	2	kali	2	2	2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	2	kali	2	2	2
<b>2</b>	<b>Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan Stunting.</b>								
a	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	DINKOMINFO	Semua OPD, Pemangku Kepentingan	9	kanal/ perbulan	9	5	5
b	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan	9	kanal/ perbulan	9	5	5
c	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	DINKOMINFO	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES	9	kanal/ perbulan	9	5	5
<b>3</b>	<b>Peningkatan cakupan keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</b>								
a	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH	100	persen	100	100	100
b	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH	100	persen	100	100	100
c	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPUPR, DINKOMINFO, DPRKPLH	100	persen	100	100	100
<b>4</b>	<b>Meningkatkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>								
a	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
<b>5</b>	<b>Meningkatkan pemberian imunisasi dasar lengkap</b>								
a	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan	DINKES	DINKOMINFO, Kecamatan	1	kali	1	1	1
c	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
<b>6</b>	<b>Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.</b>								
a	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten	DINKES	BAPPEDA,BKPSDM, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
<b>7</b>	<b>Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penangan</b>								
a	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DINDIKPORA	DINKES, DPPPAPKB	1.57	persen	1.5	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	DINDIKPORA	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	1.57	persen	1.5	100	100
c	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa	DINDIKPORA	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB	1.57	persen	1.5	100	100
<b>8</b>	<b>Meningkatkan cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-</b>								
a	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten	DINDIKPORA	DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan	DINDIKPORA	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
c	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa	DINDIKPORA	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
<b>9</b>	<b>Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar</b>								
a	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, Tim Pakar	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
<b>10</b>	<b>Melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</b>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i>	Tersedianya pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i>	DPPPAPPKB	DINKES	100	persen	100	100	100
b	Penyuluh untuk mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya tim penyuluh yang mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB)	DPPPAPPKB	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	DPPPAPPKB	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES	1	kali	1	1	1
<b>11</b>	<b>Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat</b>								
a	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten	DINSOS	DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH	1	kali	1	1	1
b	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH	2	kali	2	2	2
c	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan	DINSOS	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH	2	kali	2	2	2
<b>12</b>	<b>Meningkatkan cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan</b>								
a	Sosialisasi KIE bagi remaja	Terselenggaranya sosialisasi KIE bagi remaja	DPPPAPPKB	DINKES	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Terselenggaranya sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	DPPPAPPKB	Kecamatan, KEMENAG, DINKES	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan pengolahan BKR dan PIK Remaja	Tersedianya pelatihan pengelola BKR dan PIK Remaja	DPPPAPPKB	Bagian Pemerintahan, DINKES	1	kali	1	1	1
<b>13</b>	<b>Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i></b>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Kantor KEMENAG	Kecamatan, DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten desa	Kantor KEMENAG	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
<b>14</b>	<b>Melaksanakan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.</b>								
a	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	FKUB, DINKES, DPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan	Kantor KEMENAG	Kecamatan, DINKES, DPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa	Kantor KEMENAG	Bagian Pemerintah, DINKES, DPPAPPKB	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
<b>15</b>	<b>Meningkatkan cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i></b>								
a	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB	100	persen	100	100	100
b	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB	100	persen	100	100	100
c	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Desa	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>C</b>	<b>Pilar 3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa</b>								
<b>1</b>	<b>Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah</b>								
a	Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kecamatan	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Desa	Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Desa	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
<b>2</b>	<b>Mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan</b>								
a	Sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat Kabupaten	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	BAPPEDA, BPKPAD	100	persen	100	100	100
b	Sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat kecamatan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	Kecamatan, BAPPEDA, BPPKPAD	100	persen	100	100	100
c	Adanya perencanaan penganggaran dan tindak lanjut untuk program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	Tersedianya perencanaan penganggaran untuk program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	BAPPEDA, BPKPAD	100	persen	100	100	100
<b>3</b>	<b>Meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>.</b>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Terselenggaranya advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	DINPERMADES	BAPPEDA	90	persen	90	90	90
b	Advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Terselenggaranya advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	DINPERMADES	Kecamatan, BAPPEDA	90	persen	90	90	90
c	Desa/kelurahan mengalokasikan dana untuk intervensi spesifik dan sensitif	Tersedianya alokasi dana Desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif	DINPERMADES	Bagian Pemerintahan, BAPPEDA	90	persen	90	90	90
<b>4</b>	<b>Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</b>								
a	Aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	BAPPEDA	Kecamatan, semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
c	Desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa	BAPPEDA	Bagian Pemerintahan, semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</b>								
a	Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kabupaten	DINKES	DPUPR, DPRKPLH	2	kali	2	2	2
b	Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	2	kali	2	2	2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan	Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan	DINKES	DINPERMADES	2	kali	2	2	2
<b>6</b>	<b>Meningkatkan cakupan calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).</b>								
a	Sosialisasi gerakan minum tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi gerakan minum tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat Kabupaten	DINKES	DINKOMINFO, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin	Terselenggaranya pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin	DINKES	Kecamatan, TP PKK	100	persen	100	100	100
c	Pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat desa/kelurahan	Terselenggaranya pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat desa/kelurahan	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES	100	persen	100	100	100
<b>7</b>	<b>Meningkatkan cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.</b>								
a	Peningkatan jumlah Ibu hamil KEK yang menerima PMT untuk tambahan asupan gizi	Terselenggaranya PMT untuk tambahan asupan gizi Ibu hamil KEK	DINKES	DPPPAPPKB, DKPPP	100	persen	100	100	100
b	Distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>8</b>	<b>Meningkatkan cakupan ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.</b>								
a	Advokasi ke ibu hamil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan	Terselenggaranya advokasi ke ibu hamil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>9</b>	<b>Meningkatkan cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.</b>								
a	Advokasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	Terseleenggaranya advokasi untuk Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan tingkat Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
c	Peningkatan asupan PMT kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	Terjadinya peningkatan asupan PMT kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	DINKES	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	100	persen	100	100	100
<b>10</b>	<b>Meningkatkan cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).</b>								
a	Advokasi Kepada Ibu Hamil dan Menyusui untuk memberikan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan	Terseleenggaranya advokasi Kepada Ibu Hamil dan Menyusui untuk memberikan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
b	Distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>11</b>	<b>Meningkatkan cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk</b>								
a	Advokasi kepada Ibu Balita gizi buruk tentang tata laksana gizi buruk	Terseleenggaranya advokasi kepada Ibu Balita gizi buruk tentang tata laksana gizi buruk	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Kabupaten	Terlaksananya distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Kabupaten	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>12</b>	<b>Meningkatkan cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.</b>								
a	Advokasi kepada Ibu Balita gizi kurang tentang asupan gizi	Terselenggaranya advokasi kepada Ibu Balita gizi kurang tentang asupan gizi	DINKES	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Kabupaten	Terlaksananya distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Kabupaten	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Desa/kelurahan	Terlaksananya distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Desa/kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>13</b>	<b>Meningkatkan cakupan kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.</b>								
a	Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DKPPPP	DKPPP, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	DKPPPP	Kecamatan, DKPPP, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa	DKPPPP	Pemerintah Desa, DINPERMADES, DKPPP, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1
<b>14</b>	<b>Meningkatkan cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.</b>								
a	Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kabupaten (rumah sakit)	Tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kabupaten (rumah sakit)	DINKES	Semua RS, DPUPR, DPPPAPPKB	4	RS	4	4	4
b	Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DINKES	DPUPR, DPPPAPPKB	17	PUSKESMAS	17	17	17
<b>15</b>	<b>Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat Desa/Kelurahan (posyandu)</b>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Pelatihan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kabupaten	Tersedianya pelatihan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, DINPERMADES	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kecamatan	Tersedianya pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINKES	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES	1	kali	1	1	1
<b>16</b>	<b>Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting.</b>								
a	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG	3	kali	3	3	3
b	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kecamatan	Terselenggaranya cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG	3	kali	3	3	3
c	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat desa	Terselenggaranya cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat desa	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG	3	kali	3	3	3
<b>17</b>	<b>Meningkatkan cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.</b>								
a	Advokasi pada PUS pada tingkat Kabupaten	Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat Kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Advokasi pada PUS pada tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Advokasi pada PUS pada tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
<b>18</b>	<b>Meningkatkan cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).</b>								
a	Pelaporan tentang hasil pemeriksaan status anemia pada remaja putri	Adanya pelaporan tentang hasil pemeriksaan status anemia pada remaja putri	DINKES	DINSOS	100	persen	100	100	100
b	Advokasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia tingkat kecamatan	Terlaksananya advokasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia tingkat kecamatan	DINKES	DINDIKPORA	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Melaksanakan sosialisasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia	Terselenggaranya sosialisasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia	DINKES	DINDIKPORA	2	kali	2	2	2
<b>19</b>	<b>Menyediakan data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>.</b>								
a	Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DPPPAPPKB	DINKES, TP PKK	1	kali	1	1	1
c	Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES, TP PKK	1	kali	1	1	1
<b>20</b>	<b>Meningkatkan cakupan kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate /ASFR (15-19)</i> paling sedikit 18 per 1.000.</b>								
a	Peningkatan pendewasaan usia perkawinan	Adanya peningkatan pendewasaan usia perkawinan	DPPPAPPKB	DINKES, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
b	Meningkatkan cakupan KB pasca persalinan	Adanya peningkatan cakupan KB pasca persalinan	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
c	Melaksanakan sosialisasi tentang Jo Kawin Bocah	Terlaksananya sosialisasi tentang Kawin Bocah	DPPPAPPKB	DINKES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
<b>21</b>	<b>Meningkatkan cakupan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.</b>								
a	Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat kabupaten	Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
b	Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINKES, RS	100	persen	100	100	100
c	Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat desa	Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat desa	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES, RS	100	persen	100	100	100
<b>22</b>	<b>Menurunkan cakupan pelayanan berencana <i>unmet need</i> keluarga</b>								
a	Memfasilitasi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i>	Tersedianya fasilitas alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i>	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
b	Distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
c	Distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
<b>D</b>	<b>Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat</b>								
<b>1</b>	<b>Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.</b>								
a	Sosialisasi gizi bencana tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi gizi bencana tingkat Kabupaten	DINKES	BPBD	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi gizi bencana tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi gizi bencana tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, BPBD	1	kali	1	1	1
c	Intervensi tentang peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	Adanya intervensi tentang peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	DKPPP	Pemerintah Desa, TP PKKK	100	persen	100	100	100
<b>2</b>	<b>Meningkatkan asupan gizi keluarga berisiko Stunting melalui pemanfaatan sumber daya pekarangan</b>								
a	Sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kabupaten	DKPPP	DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	DKPPP	DINPERMADES, DINKOMINFO	100	persen	100	100	100
c	Pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DKPPP	Pemerintah Desa, DINPERMADES, DINKOMINFO	100	persen	100	100	100
<b>3</b>	<b>Meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko Stunting</b>								
a	Advokasi dalam peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko Stunting	Terlaksananya advokasi dalam peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i>	DKPPP	DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	DKPPP	Kecamatan, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Bantuan intervensi PMT lokal bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya bantuan intervensi PMT lokal bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DKPPP	DINKES, Pemerintah Desa, DPPAPPKB, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>4</b>	<b>Memberikan variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</b>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kabupaten	Terlaksananya advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan	DINSOS	DINPERMADES, DKPPP	1	kali	1	1	1
b	Advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINPERMADES, DKPPP	1	kali	1	1	1
c	Intervensi variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat Desa/Kelurahan	Adanya intervensi variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DINPERMADES, DKPPP	100	persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>Memberikan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>								
a	Pelaporan tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya pelaporan tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	DINSOS	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Advokasi tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan	DINSOS	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
<b>6</b>	<b>Memberikan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>								
a	Pelaporan tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya pelaporan tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	DINSOS	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Advokasi tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Pemberian bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
<b>7</b>	<b>Meningkatkan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>								
a	Pelaporan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya pelaporan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	DINSOS	DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Advokasi tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Updating data PUS fakir miskin tiap bulan di tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya updating data PUS fakir miskin tiap bulan di tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
<b>8</b>	<b>Meningkatkan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha</b>								
a	Pelaporan tentang kegiatan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Adanya pelaporan tentang kegiatan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	DINKES	DINKOPDAG, DPM	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target			
							2022	2023	2024	
b	Pelatihan tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di Tingkat Kecamatan	Adanya pelatihan tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di Tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOPDAG, DPM	1	kali	1	1	1	
c	Sosialisasi tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1	
<b>E</b>	<b>Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi</b>									
<b>1</b>	<b>Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting</b>									
a	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	DINKOMINFO	BAPPEDA	100	persen	100	100	100	
b	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan, BAPPEDA	100	persen	100	100	100	
c	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	DINKOMINFO	Pemerintah Desa, BAPPEDA	100	persen	100	100	100	
<b>2</b>	<b>Meningkatkan kinerja pemerintah dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting</b>									
a	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	BAPPEDA	OPD terkait	100	persen	100	100	100	
b	Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kinerja pemerintah kecamatan dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	BAPPEDA	Kecamatan, OPD terkait	100	persen	100	100	100	
c	Meningkatkan kinerja aparat desa dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kinerja aparat desa dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	BAPPEDA	OPD terkait, Pemerintah Desa	100	persen	100	100	100	
<b>3</b>	<b>Melakukan publikasi data Stunting</b>									
a	Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	DINKES	BAPPEDA, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, BAPPEDA, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
c	Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, BAPPEDA, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
<b>4</b>	<b>Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></b>								
a	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah	BAPPEDA	OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	BAPPEDA	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	BAPPEDA	Pemerintah Desa, OPD terkait	100	persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>Menyelenggarakan audit kasus <i>Stunting</i></b>								
a	Pelaporan audit kasus <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	Kabupaten, OPD terkait, Tim Pakar	2	kali	2	2	2
b	Pelaporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kecamatan	Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, OPD terkait, Tim Pakar	2	kali	2	2	2
c	Pelaporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Desa/Kelurahan	Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, OPD terkait	2	kali	2	2	2
<b>6</b>	<b>Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.</b>								
a	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat kabupaten	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat kabupaten	DINKOMINFO	OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat kecamatan	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan, OPD terkait	100	persen	100	100	100
c	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat desa	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat desa	DINKOMINFO	Pemerintah Desa, OPD terkait	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
<b>7</b>	<b>Menyediakan sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi</b>								
a	Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kabupaten	Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kabupaten	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	BAPPEDA, BPKPAD	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kecamatan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	Kecamatan, BAPPEDA, BPKPAD	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Desa/kelurahan	Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Desa/Kelurahan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	Pemerintah Desa, BAPPEDA, BPKPAD	1	kali	1	1	1
<b>8</b>	<b>Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting</b>								
a	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	DINKOMINFO	OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan, OPD terkait	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	DINKOMINFO	Pemerintah Desa, OPD terkait	100	persen	100	100	100
<b>9</b>	<b>Menyediakan data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).</b>								
a	Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kabupaten	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	BPS, DINSOS, DINDUKCAPIL	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kecamatan	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINSOS, DINDUKCAPIL	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINSOS, DINDUKCAPIL	100	persen	100	100	100
<b>10</b>	<b>Menyediakan sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.</b>								
a	Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kabupaten	Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kabupaten	DINKOMINFO	Kantor KEMENAG, DINKES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kecamatan	Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kecamatan	DINKOMINFO	Kantor KEMENAG, Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Desa/kelurahan	DINKOMINFO	Kantor KEMENAG, Pemerintah Desa, DINKES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
<b>11</b>	<b>Mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i></b>								
a	Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	DINKES	DPPPAPPKB, Kecamatan, TP PKK	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	DPPPAPPKB, Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
<b>12</b>	<b>Melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi</b>								
a	Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kabupaten	Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kabupaten	BAPPEDA	Kabupaten, OPD terkait	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kecamatan	BAPPEDA	OPD terkait	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Desa/Kelurahan	BAPPEDA	DPPPAPPKB, Pemerintah Desa, OPD terkait	1	kali	1	1	1
<b>13</b>	<b>Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.</b>								
a	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kabupaten	Perguruan Tinggi	DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
b	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kecamatan	Terselenggaranyapendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kecamatan	Perguruan Tinggi	DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
c	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat desa	Terselenggaranya pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat desa	Perguruan Tinggi	Pemerintah Desa, DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
<b>14</b>	<b>Menyusun rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</b>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	BAPPEDA	DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten	1	kali	1	1	1
b	Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	BAPPEDA	DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten	1	kali	1	1	1
c	Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	BAPPEDA	DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten	1	kali	1	1	1
<b>15</b>	<b>Menyediakan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi</b>								
a	Pelaporan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Adanya pelaporan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	BPKPAD	OPD terkait	1	kali	1	1	1
b	Advokasi sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Terlaksananya advokasi sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	BPKPAD	Kecamatan, OPD terkait	1	kali	1	1	1
c	Pemberian insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Terlaksananya pemberian insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	BPKPAD	Pemerintah Desa, BAPPEDA, DINPERMADES	1	kali	1	1	1
<b>16</b>	<b>Menyusun kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</b>								
a	Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	BPKPAD	BAPPEDA	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	BPKPAD	BAPPEDA, Kecamatan	1	kali	1	1	
c	Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	BPKPAD	Pemerintah Desa, BAPPEDA, DINPERMADES	1	kali	1	1	1

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 22 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN  
 PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN  
 TEMANGGUNG TAHUN 2023 - 2024

**FORMAT PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	ANGGARAN (RP)	DPA	REALISASI S/D SEMESTER 1 2023		REALISASI S/D SEMESTER 2 2023		SUMBER DANA
										KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2023 - 2024

**FORMAT EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	OPD	PERMASALAHAN	SOLUSI	SIMPULAN

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

